

# Obat Jamkesmas Dihentikan

## ■ RSUD Soedarso Utang Rp 800 Juta

PONTIANAK, TRIBUN - Pasien keluarga miskin yang ditanggung Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di RSUD dr Soedarso terancam tidak mendapat obat-obatan. Sebab empat distributor obat menghentikan pasokan untuk Juli 2011 karena RSUD Soedarso menunggak pembayaran obat sekitar Rp 800 juta.

Stok obat pun hanya cukup hingga pekan pertama Agustus. "Ada tagihan dari PBF (Partai Besar Farmasi) untuk obat-obatan April, Mei, dan Juni 2011 yang nilainya sekitar Rp 800 juta. Bukan niat kami untuk tidak



TRIBUN/DOK

” Untuk mengatasi tagihan sekarang, Pak Gubernur menyarankan meminjam dari dana talangan pemprov. ”

**dr GDE SANJAYA**

Dirut RSUD dr Soedarso

mau membayar, tapi ini cuma masalah administratif,” kata Direktur Utama RSUD dr Soedarso, dr Gde Sanjaya, yang ditemui *Tribun* di ruang kerjanya, Kamis (21/7).

Gde mengatakan jika pekan depan tagihan itu tidak

dilunasi, ada kemungkinan distributor akan menyetop pasokan obat. Untuk itu pihaknya terus berupaya mendapatkan dana talangan dari Pemprov Kalbar untuk menutup utang

tersebut.

"Tadi malam, saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur. Beliau menginginkan segera ditangani, jangan sampai obat-obatan terhenti. Beliau sudah menyetujui memberikan dana talangan. Bagian keuangan juga sudah menyetujui. Kemungkinan pekan depan beres masalahnya," ujar Gde.

Gde menuturkan sejak Jamkesmas digulirkan, masalah utama adalah soal klaim penggunaan dana Jamkesmas dari BRI karena alasan administrasi yang tidak lengkap. Bank tidak akan memberikan dana tersebut jika tidak melalui verifikasi.

Verifikasi sendiri kerap terlambat karena masih ada petugas administrasi yang lalai. Misalnya, ada syarat surat keterangan miskin pasien tidak dicantumkan setelah pasien itu keluar dari RS. Ada juga di antaranya karena dokter lupa mencantumkan diagnosis.

"Dana Jamkesmas itu diberikan Kemenkes kepada RSUD Soedarso langsung ke rekening Dirut RSUD Soedarso. Kemudian RSUD mengajukan ke BRI sesuai dengan pemakaian dilengkapi surat-suratnya. Administrasi ini harus diverifikasi oleh verifikasi independen," ujar Gde.

Ia mencontohkan pemakaian Januari 2009 baru bisa diklaim Juni tahun yang sama karena proses verifikasi dan melengkapi pesyaratannya menjadi sangat lama. "Dana dari Kemenkes itu fluktuatif tiap bulannya. Terkadang Rp 6 miliar, Rp 10 miliar, bahkan Rp 20 miliar. Kalau dulu, terkadang dana yang digunakan lebih dan kita simpan sebagai dana taktis. Sehingga bisa menutupi kekurangan pemakaian di bulan-bulan berikutnya," ujarnya.

Namun sistem ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak tepat sehingga harus diubah. Pihaknya kemudian meminta solusi kepada Kemenkes dan Kemendagri bagaimana mengatasi biaya Jamkesmas ketika dananya tak mencukupi.

"Kemudian Kemenkes mengatakan saldo anggaran itu bisa digunakan untuk peningkatan pelayanan RS dengan syarat disertai peraturan gubernur. Gubernur kemudian

membuat Pergub Nomor 36 Tahun 2010," papar Gde.

Menurut Pergub tersebut saldo tersisa tahun lalu disetor ke kas daerah. Selanjutnya, dana itu bisa digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan administrasi pelaporan yang jelas.

Kelebihan saldo digunakan sebagai panjar untuk peningkatan kesehatan, di antaranya membayar obat, darah, alat kesehatan habis pakai, dan alat cuci darah.

Setelah verifikasi selesai dilakukan, BRI akan membayar kembali. "Untuk mengatasi tagihan sekarang, Pak Gubernur menyarankan meminjam dari dana talangan pemprov. Beliau mengatakan soal obat-obatan ini emergensi, harus disegerakan," tegas Gde.

Petugas Apotek Jamkesmas yang enggan disebut namanya, mengatakan ada empat distributor obat yang akan menahan (hold) pasokan obat Jamkesmas ke RSUD Soedarso. Selama ini, pemesanan obat secara *online* dan *real time* di tingkat pusat. Mereka melihat masih ada tunggakan dan RSUD tidak bisa mengajukan pesanan obat baru.

Empat distributor itu di antaranya Kimia Farma yang memasok obat narkotika untuk bedah, PT Tempo yang memasok obat yang bukan *live saving* artinya yang bisa disubstitusi dengan obat generik lain, PT Anugerah Pharmindo Lestari (PT APL) yang memasok obat bagi penderita thalasemia, dan PT Rajawali yang memasok obat di antaranya antibiotika.

"Stok obat thalasemia dan narkotika untuk keperluan bedah itu masih bisa bertahan sampai minggu pertama Agustus. Mudah-mudahan seperti kata Pak Dirut tunggakan pekan ini bisa dibayar sehingga pasokan obat tidak terkendala," katanya.

#### Tidak Masalah

Jika di RSUD Soedarso pembayaran klaim obat untuk pasien Jamkesmas bermasalah, tidak dengan RSUD dr Abdul Aziz, Singkawang dan RSUD Sambas. Direktur RSUD Abdul Aziz, dr Carlos Dja'afara, menegaskan tidak ada masalah dalam menangani pasien Jamkesmas. Apalagi yang terkait

anggaran. "Anggarannya selalu tersedia. Berapapun yang kita klaim, selalu diganti," kata Carlos.

Menurut Carlos, saldo dana Jamkesmas yang ada di rekening RSUD saat ini, sekitar Rp 3,2 miliar. Sementara kebutuhan jika di rata-rata berkisar pada angka Rp 1 miliar. "Tiap bulannya tidak sama. Karena jumlah pemegang kartu Jamkesmas yang berobat tiap bulannya, juga berbeda-beda," jelasnya.

Bahkan menurut Carlos, persoalan justru ada di manajemen RSUD yang dipimpinnya. Saldo Rp 3,2 miliar itu saja, belum termasuk klaim dari Desember 2010 hingga Juni 2011. "Normalnya, klaim Jamkesmas itu, hanya berselang satu bulan," ujarnya.

#### Inisiasi DPRD

Persoalan keterlambatan pembayaran obat Jamkesmas, mendapat perhatian DPRD Kalbar. Sekretaris Komisi D DPRD Kalbar yang membicarakan kesehatan, Andy Hudaya, meminta manajemen RSUD Soedarso segera mengajukan rapat inisiasi dengan Komisi D DPRD Kalbar. Tujuannya untuk membahas secara khusus persoalan Jamkesmas.

Menurutnya, persoalan Jamkesmas sangat serius karena menyangkut masyarakat banyak, khususnya kesehatan kalangan tidak mampu.

"Saya meminta kepada RSUD Soedarso melalui Direktur Gede Sanjaya secepatnya untuk membicarakan dengan DPRD di Komisi C. RSUD Soedarso bisa mengajukan inisiatif untuk membahas khusus masalah ini, jangan tunggu undangan DPRD. Memang kita dengan RSUD Soedarso ada rapat kerja. Tapi itu forumnya lebih luas dan tidak spesifik. Terus terang, saya dan Komisi D belum mendapatkan informasi mengenai permasalahan ini seperti apa," ujar Andy Hudaya.

Politisi Partai Golkar ini memastikan ketika undangan diajukan, DPRD bisa segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya dengan memanggil Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), termasuk Biro Hukum, serta Pemprov Kalbar. terma-

suk distributor obat.

Desakan serupa juga datang dari Ketua DPRD Kalbar, Minsen. Politisi PDIP ini meminta pemprov melalui instansi terkait segera merealisasikan pembayaran obat Jamkesmas melalui dana talangan. Sebab Jamkesmas sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu.

"Tolong Pemprov mempercepat pembayaran itu. Kita minta serius dan seriuslah menanganinya. Coba pihak RSUD menyampaikan kepada DPRD. Kita siap memfasilitasi ini. Kita akan cari solusi," paparnya.

#### Warga Terbantu

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Andy Jap, mengatakan dana Jamkesmas yang dikelola setiap RSUD langsung dikururkan dari Kementerian Kesehatan. Di mana untuk mendapatkannya pihak rumah sakit lah yang mengajukan langsung.

Setahu Andy Jap, pemerintah selalu tanggap dalam mengururkan dana Jamkesmas selama itu sudah dilakukan verifikasi.

Sementara itu, fasilitas Jamkesmas dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu. Sarwito (30), misalnya. "Kalau tidak ada Jamkesmas, masyarakat seperti saya ini pasti kebingungan kalau sudah berobat ke rumah sakit," kata Sarwito yang ditemui di IGD RSUD Dr Soedaso.

Ayah dua anak asal Banten, Tangerang ini merasakan sendiri manfaat Jamkesmas saat istrinya melahirkan anak kedua. "Tetangga bilang biaya melahirkan Rp 5-6 juta. Namun dengan Jamkesmas, biaya mahal hanya Rp 700 ribu. Itu pun untuk obat luar, bahkan katanya bisa gratis," ujar pria yang sehari-hari mengoperasikan jasa angkutan sungai ini.

Penuturan berbeda diungkapkan Ando, warga Sambas. Lelaki yang berobat di RSUD Sambas ini mengaku kesal karena masih harus membayar obat. Padahal ia sudah mengantongi kartu Jamkesmas. "Kalau ada kartu Jamkesmas seharusnya gratis semua obatnya. Begitu juga pelayanan. Ada bedanya antara umum dengan Jamkesmas. Kalau pakai Jamkesmas pelayanan tidak begitu cepat," ujarnya. (ari/shr/rhd/hdi/rhd)